

Penularan Covid-19 Semakin Masif

WONOSOBO (KR) - Penularan kasus konfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Wonosobo kian masif. Jumlah akumulasi penderita terkonfirmasi positif Covid-19 telah mencapai 971 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 479 orang masih menjalani perawatan/isolasi, 449 orang sembuh, dan angka kematian mencapai 43 kasus. "Jumlah kasus yang semakin meningkat, berdampak pada penuhnya ketersediaan tempat penampungan pasien Covid-19 baik di rumah sakit maupun gedung-gedung isolasi yang disediakan pemerintah daerah. Semoga penyebaran Covid-19 di Wonosobo bisa segera melemah, sehingga tidak terjadi lagi lonjakan kasus terkonfirmasi positif," ungkap Bupati Wonosobo Eko Purnomo yang juga Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19, Kamis (15/10).

Terkait ketersediaan tempat isolasi baik di 3 rumah sakit rujukan maupun 4 gedung isolasi yang mulai penuh, jelas Bupati, tim satgas terus berupaya mencari alternatif tempat lain. Bahkan jika memang sangat mende-sak dan dianggap perlu, Pemkab Wonosobo siap mengandeng perhotelan untuk dijadikan tempat isolasi bagi pasien positif Covid-19. Selain itu, Pemkab Wonosobo juga terus meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terkait penerapan protokol kesehatan dengan membentuk tim satgas pengawas hingga di tingkat desa/kelurahan. Pihaknya berharap upaya tersebut mampu memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. **(Art)**

Stunting Hambat Perkembangan Ekonomi

KARANGANYAR (KR) - Dampak stunting tidak hanya merugikan individu tapi juga menghambat ekonomi dan pembangunan. Sehingga, upaya penurunan angka stunting di daerah kritis dipercepat. Plt Kepala Dinas Kesehatan Karanganyar Purwati mengatakan daerah kritis stunting antara lain Jumapolo, Jatiyoso, Jenawi dan Karangpandan. Data tersaji pada 2019, angka kasus tinggi di Desa Petung, Tlobo, Kadipiro, Kwangsan dan Gondangmanis.

"Angka prevelensi menurun. Tapi belum benar-benar nol. Faktor-faktor pemicu stunting ada berbagai maca, Tidak hanya soal kemiskinan," kata Purwati, Kamis (15/10). Berdasarkan angka pravelansi kasus stunting, mengalami tren menurun. Tahun 2016 sebesar 24,1 persen, 2017 sebesar 22,6 persen, 2018 sebesar 13,8 persen dan 2019 sebesar 6,3 persen. Dikatakan, stunting sangat berkaitan penyebab kesakitan, kematian, menurunnya daya tahan tubuh, produktifitas, kurangnya kecerdasan dan perkembangan otak suboptimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi stunting diantaranya faktor maternal, lingkungan rumah, pemberian makanan, pemberian asi saat menyusui, pola asuh, infeksi, ekonomi, sosial, budaya, sanitasi dan air. Berbagai gangguan fungsi tersebut menghambat perkembangan motorik maupun mental. **(Lim)**

Sukseskan Pilkada, Ormas LDII Netral Aktif

WONOGIRI (KR) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LDII Ir H Chriswanto Santoso MSc menyatakan, warga LDII yang memiliki hak pilih dalam Pilkada serentak 2020 tidak boleh ada yang golongan putih (golput). Adapun dalam menentukan pilihan politiknya warga LDII ditekan akan harus bersikap netral aktif.

Hal itu diungkapkan Chriswanto dalam sarasehan dan pembekalan organisasi yang digelar di Ponpes Al Barru Bulusulur Wonogiri, Rabu (14/10) malam. Hadir dalam acara tersebut Ketua DPW LDII Jateng Prof Singgih Tri Sulistiyono MHum, pengurus DPD LDII Wonogiri, Wanhatda dan kalangan ulama LDII. "Acara secara daring diikuti 2.000 warga

yang tersebar pada 29 studio di 23 Pengurus Cabang (PC). Sementara, daring di studio utama Ponpes Al Barru diisi 50 orang dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat," ujar Sekretaris LDII Wonogiri Agung Susanto SE.

Dalam pertemuan itu, Chriswanto menegaskan dalam Pemilu maupun Pilkada, LDII menganut sikap politik netral dan aktif, "Termasuk di Wonogiri. Kami menegaskan secara lembaga LDII tidak berafiliasi atau mendukung partai politik tertentu," ujar Chriswanto Santoso. Sikap aktif, menurut Chriswanto, warga LDII mendorong menyalurkan aspirasi politiknya. Mereka dilarang golput atau tidak memilih dan turut menyukseskan Pemilu atau Pilkada

2020.

Diingatkan, Pilkada Wonogiri merupakan proses demokrasi, untuk menghasilkan pemimpin yang langsung dipilih oleh rakyat. Mereka yang terpilih, akan menjalankan program kerjanya selama lima tahun, "Warga LDII saya harapkan dapat memilih kepala daerah yang berintegritas untuk melaksanakan program kerjanya untuk memajukan Wonogiri," ujamnya.

Ketua DPW LDII Jawa Tengah mengatakan LDII di Wonogiri telah menjadi salah satu ormas terbesar selain Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, "LDII telah menjadi bagian dari Islam arus utama di Wonogiri.

LDII yang dikukuhkan sebagai pengurus MUI kabupaten," ujar Singgih.

Singgih mengingatkan, dengan diakuinya eksistensi LDII sebagai bagian Islam arus utama, harus diakui perubahan sikap. "LDII kini dianggap menjadi mitra, dalam membangun karak-

ter bangsa yang nasionalis religius," imbuh Singgih. Di-harapkan pengurus LDII yang jadi bagian MUI Wonogiri harus menjadi pengayom dan penyejuk. Mereka harus menjadi solusi atas kegelisahan warga dalam menghadapi setiap masalah. **(Dsh)**



KR-Dhoko Santoso HP

Ketum LDII saatmemberikan arahan di Ponpes Al Barru Bulusulur Wonogiri.

Tripartid Perlu Duduk Bersama Bahas UU Ciptaker

SUKOHARJO (KR) - Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) perlu dibahas bersama untuk dipelajari melibatkan tripartid terdiri dari buruh, pengusaha dan pemerintah daerah.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk sikap atas terjadinya banyak protes di berbagai daerah. Terlebih lagi keberadaan isi Undang-undang Cipta Kerja belum banyak diketahui oleh semua pihak.

Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo, Suharno, Kamis (15/10), mengatakan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo meminta pada tripartid untuk duduk bersama melakukan koordinasi dan membahas terkait Undang-undang Cipta Kerja. Hal itu dilakukan untuk membantu menyelesaikan masalah yang muncul. Sebab diberbagai daerah telah muncul

protes berupa aksi demo menolak keberadaan Undang-undang Cipta Kerja.

Langkah duduk bersama tersebut sudah dilakukan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo dan terlaksana sejak Oktober lalu. Dalam pertemuan selalu dihadiri pihak buruh, pengusaha dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo. "Koordinasi tripartid di Sukoharjo sudah dilakukan, tapi perlu lagi duduk bersama mempelajari isi Undang-undang Cipta Kerja. Sebab sampai sekarang belum ada yang tahu isi Undang-undang Cipta Kerja tersebut namun sudah muncul banyak aksi demo di berbagai daerah," ujarnya.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo sampai sekarang juga belum menerima salinan ataupun mengetahui isi terkait Undang-undang Cipta Kerja. Sebab Undang-undang Cipta Kerja tersebut masih berada di pihak pemerintah pusat dan DPR RI. "Di daerah seperti kami di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo juga masih menunggu dan belum tahu isi Undang-undang Cipta Kerja,i lanjutnya.

Suharno mengatakan, duduk bersama tripartid tidak sekadar koordinasi namun juga membahas mengenai apa saja aturan yang perlu mendapat tanggapan. Terlebih lagi sekarang muncul banyak bentuk protes dari buruh terkait isi Undang-undang Cipta Kerja. Karena belum mengetahui secara pasti isinya, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo meminta pada buruh untuk bersabar sampai menerima ke-

pastian salinan Undang Undang Cipta Kerja dari pemerintah pusat.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo nantinya akan memfasilitasi buruh apabila ada aturan dalam Undang-undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan. Nantinya akan dilakukan pembahasan bersama dan hasilnya akan disampaikan ke pemerintah melalui rapat virtual Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo dan dari daerah lain. Dalam rapat virtual tersebut salah satu usulannya yakni menciptakan lapangan kerja yang mengakomodir pengangguran, meningkatkan daya saing investasi dengan negara lain dan pertumbuhan ekonomi. **(Mam)**

HUKUM

BERMODUS GADAIKAN MOBIL
Ibu Muda Perdaya Korban

WATES (KR) - Petugas Satreskrim Polres Kulonprogo berhasil mengamankan seorang ibu muda berinisial AAB (33) warga Wonosari Gunungkidul karena diduga terlibat dalam kasus penipuan dengan modus menggadaikan mobil.

Kasubbag Humas Polres Kulonprogo, Iptu I Nengah Jeffry, Rabu (14/10), mengungkapkan kasus penipuan ini dilakukan AAB bersama temannya, JS. AAB berhasil diamankan petugas pada September 2020, sedangkan JS saat ini ditahan di Polres Gunungkidul dalam perkara yang lain.

KR-Dani Ardiyanto

Iptu I Nengah Jeffry (kiri) menunjukkan bukti screenshot WA dan tersangka AAB.

Peristiwa ini terjadi pada 28 Mei 2020. Bermula saat korban, Dawimah (41) warga Grabag Purworejo Jawa Tengah, melihat postingan di facebook dengan akun Lintang Songgoringgi yang menawarkan menggadai mobil sebesar Rp 20.000.000. Korban berminat kemudian menghubungi pelaku.

Setelah terjadi kesepakatan, korban bertemu AAB dan JS di depan YIA untuk bertransaksi gadai mobil. Akhirnya, mobil digadai sebesar Rp 18.000.000. Kemudian pada 8 Juni 2020, AAB bersama JS datang ke rumah korban dengan alasan meminjam STNK sekaligus mobil guna mengurus pajak kendaraan. Korban setuju mobil dibawa, dengan AAB ditinggal di rumah sebagai jaminan.

"Mobil pun dibawa JS. Kemudian AAB izin hendak ke ATM minta didampingi anak korban. AAB berhasil kabur setelah dijemput JS saat berada di ATM sebuah SPBU di Grabag. Korban berupaya menghubungi lewat WA, namun sudah diblokir. Atas perbuatannya, AAB dikenakan Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP tentang penipuan atau penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara," jelasnya. **(M-4)**

Ingin Pamit Mudik, Malah Gasak HP

SLEMAN (KR) - Gelap mata membuat RZ (25) nekat mencuri HP milik Firgan (18). Meskipun telah mudik ke kampung halamannya di Bekasi Jawa Barat, RZ berhasil ditangkap unit Reskrim Polsek Ngaglik.

Kapolsek Ngaglik Kopol Tri Adi, Rabu (14/10) menjelaskan, pencurian terjadi saat pelaku datang ke kontrakan korban, Rabu (7/10) sekitar pukul 11.00. Pelaku yang kos tak jauh dari kontrakan korban, datang ke lokasi dengan berjalan kaki. "Kedatangan pelaku, awalnya untuk pamitan dengan temannya yang satu kontrakan dengan korban," ujar Kapolsek didampingi Kanit Reskrim Itpu Budi Karyanto.

Saat itu, kontrakan sepi dan orang yang dicari tidak ada. Saat itu, pelaku melihat HP merek Xiaomi seharga Rp 4 juta milik korban. Bukannya pergi, pelaku malah mencuri HP yang tergeletak di lantai kamar tidur korban tersebut.

Mendapatkan HP curian, pelaku bergegas meninggalkan lokasi sedangkan kor-

ban baru sadar kehilangan setelah kembali ke kontrakan. Tanpa pikir panjang, ia langsung mendatangi Polsek Nagaglik untuk melaporkan pencurian yang baru saja dialaminya.

Petugas kemudian melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dan memeriksa saksi-saksi. Dari bahan keterangan tersebut, polisi curiga jika pencurinya adalah RZ yang memang sudah beberapa kali datang ke TKP. Saat dicari di kosnya, ternyata pelaku sudah tidak ada dan menurut informasi, ia sudah mudik ke kampung halamannya. Tak ingin buruan kabur, satu pekan setelah kejadian polisi mendatangi rumah RZ di Bekasi.

Tidak hanya mengamankan RZ, petugas juga berhasil menyita barang bukti HP curian sebagai barang bukti. "Ter-sangka dan barang bukti langsung kami bawa ke Mapolsek. Ia kami jerat dengan Pasal 362 KUHP dan kini sudah berstatus tersangka dan ditahan," pungk-as Kapolres. **(Ayu)**

MEMILIKI BUKTI BARU
Mantan Dirut AMI Ajukan PK

YOGYA (KR) - Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Anindya Mitra Internasional (AMI), Topan Satir, mengajukan Peninjau Kembali (PK) atau upaya hukum luar biasa di Pengadilan Tipikor Yogya, Kamis (15/10).

Upaya hukum luar biasa itu dilakukan karena adanya novum atau bukti baru dan putusan kasasi dinilai salah dalam penerapan hukumnya.

Kuasa Hukum Pemohon PK, Deddy Suwardi SR SH, menilai hukuman yang dijatuhkan dalam putusan kasasi jauh dari keadilan dan melampaui kewenangan karena menyimpang dari pasal yang didakwakan JPU. Mahkamah Agung (MA) memutus pemohon PK melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Dalam putusan kasasi, pemohon dihukum pidana 4 tahun dengan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan. Selain itu uang pengganti Rp 439.715.504 subsider 1 tahun kurungan," jelasnya saat membacakan permohonan PK di hadapan hakim tunggal Surya Hendratmoko SH.

Menurut Deddy, dalam

PK ini pihaknya mengajukan novum berupa surat-surat yang belum diajukan dalam persidangan sebelumnya. Selain itu adanya pertimbangan putusan kasasi dinilai salah dalam penerapan hukum dan terjadi kekeliruan yang nyata. Di mana realokasi anggaran dalam BUMD berbandan hukum Perseroan Terbatas harus mendapatkan izin dari gubernur. Sementara dalam relokasi anggaran dilakukan dengan persetujuan Komisaris dan dipertanggungjawabkan dalam RUPS.

"Dalam RUPS yang dihadiri langsung oleh gubernur. Dengan telah mempertanggungjawabkan dalam RUPS, apabila terjadi permasalahan atas kebijakan yang diakukan oleh direksi dan komisaris di tahun 2006, maka hal tersebut bukanlah masalah pidana, tapi keperda-taan," paparnya.

Selain itu, pertimbangan hukum majelis kasasi

yang mengambil alih putusan *Judex Factie* telah terjadi kekeliruan yang nyata dalam menghitung kerugian negara. JPU yang menghitung sendiri kerugian negara yang diambil alih oleh *Judex Factie* dan *Judex Juris*, tanpa melakukan Audit Investigasi Proyek *Buffer Stock* oleh lembaga yang konstitusional dan kompeten telah terjadi kekeliruan.

"Kekeliruan itu berupa tidak memperhitungkan penjualan tahun 2006 sejumlah Rp 723.022.745 dan tidak memperhitungkan nilai likuidasi aset pada waktu Pembubaran

Proyek *Buffer Stock*. Selain itu salah dalam memahami Laporan Keuangan *Buffer Stock* tahun 2007," ungkapnya.

Di samping itu, putusan *Judex Juris* juga terjadi kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan putusannya. Dimana hanya menghitung kinerja Proyek *Buffer Stock* untuk menghitung manfaat kebijakan realokasi anggaran digunakan untuk menjalankan 5 program kerja, termasuk satu di antaranya Proyek *Buffer Stock*. "Pada tahun 2006, kinerja 5 program tersebut menghasilkan laba sejumlah Rp 3,192 miliar, sehingga mampu menghindarkan PT AMI dari ancaman kerugian akibat gempa bumi sejumlah Rp 1,722 miliar. **(Sni)**

KR-Saifullah Nur Ichwan

Kuasa hukum pemohon PK membacakan novum.



Meresahkan, 19 Orang Digaruk Tim Yustisi

TEGAL (KR) - Dianggap meresahkan warga, sedikitnya 19 orang berpenampilan nyentrik diamankan, Rabu (14/10). Mereka kemudian dikirim ke Dinas Sosial Kota Tegal untuk mendapat pembinaan.

Mereka dirazia oleh Tim Yustisi di Jalan DR Ciptomangunkusumo Kota Tegal, di kompleks Terminal Bus Tegal setempat. Mereka tidak mengenakan masker dan kerap berkerumun serta meminta uang kepada pengguna jalan di sekitar pintu timur terminal.

Terkait itu Kapolsek Sumurpan-gang, Kopol Ketut Lanus, Kamis

(15/10), mengatakan mereka yang diamankan sebanyak 19 anak. Rinciannya dari Jatibarang 2 orang, Brebes 1 orang, Indramayu 3 orang, Slawi 4 orang dan Kota Tegal 9 orang.

"Mereka sering berkerumun, dan meminta uang kepada pengemudi serta pengendara sepeda motor di simpang empat. Sehingga meresahkan masyarakat," ujar Lanus. Selain itu, mereka kadapatan tidak digunakan masker. Selanjutnya dibawa ke kantor Kecamatan Margadana untuk didata dan diberikan masker.

Setelah didata dan dibina mereka diserahkan ke kantor Dinsos setem-

pat. "Operasi yustisi ini akan dilanjutkan, karena banyak juga yang suka ngemen di perempatan jalan raya, sehingga mengganggu pengguna jalan," tegas Lanus.

Di tempat terpisah, Kepala Kantor Dinsos Kota Tegal, Bajari, membenarkan pihaknya telah mendapat limpahan 19 orang untuk dibina. "Saat ini mereka masih kami bina dan selanjutnya akan kami limpahkan ke rumah singgah di Kelurahan Cabawan Margadana Tegal. Harapan kami ke depan mereka menjadi generasi penerus yang baik," harap Bajari. **(Ryd)**